

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Indonesia mempunyai tujuan dengan menciptakan pembangunan yang baik sehingga hasilnya dimanfaatkan secara merata dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pembangunan, istilah ketenagakerjaan dinilai sebagai faktor permasalahan yang sangat luas dan kompleks. Permasalahan seperti ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Permasalahan tentang kurangnya lapangan kerja merupakan aspek yang sangat penting akibat ketidakmampuan negara dalam perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan terhadap perluasan lapangan kerja secara efektif. Penyerapan tenaga kerja memiliki peranan penting dalam mengurangi pengangguran karena jika jumlah kelompok tenaga kerja dan lapangan yang ada dalam suatu wilayah dapat terserap dan terisi secara optimal. Gejala-gejala sosial seperti kemiskinan, kriminalitas dan fenomena sosial-ekonomi lainnya akan selalu muncul di masyarakat jika kesempatan kerja lebih rendah dari jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri akan didapat nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud. Kenyataannya tidak semua negara berhasil mengembangkan sektor industrinya yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat dan tidak konsisten, sehingga mempengaruhi kinerja sektor industri itu sendiri (Suharto, 2002).

Produk industri mempunyai nilai jual yang tinggi daripada sektor lain, hal ini dikarenakan produk industri sangat beragam dan memberikan nilai dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Industri menjadi penolong bagi perekonomian suatu negara, sehingga pemerintah banyak memberikan kebijakan tentang industri. Pemerintah berharap tidak hanya sektor industri saja yang berkembang pesat tetapi dari sektor lain juga ikut berkembang dengan adanya peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sub-sektor industri pengolahan merupakan suatu sektor dalam kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan yang pesat sekali dalam proses pembangunan. Industri pengolahan memiliki peran kunci dalam transformasi struktural ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2011).

Sebagai sektor penting di bidang ekonomi, sektor industri diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Karena hal tersebut merupakan indikator positif untuk mengurangi masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Industri kecil

yang berproduktivitas rendah dan banyak menyerap tenaga kerja dapat memperluas lapangan pekerjaan yang diikuti dengan perluasan dan pemerataan pada tingkat taraf hidup yang rendah (Malik, 2013).

Pulau Sumatera adalah pulau kedua setelah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 59,97 juta jiwa dan memiliki kota-kota dengan perekonomian yang cukup tinggi. Kota terbesar di Pulau Sumatera seperti Medan mempunyai ekonomi tertinggi dengan contoh kantor pusat beberapa perusahaan nasional ada di Kota Medan. Selain itu, ada kota-kota lain yang menjadi pusat berkembangnya ekonomi terbesar di Pulau Sumatera yaitu Kota Batam, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung dan kota Padang.

Dalam permasalahan ketenagakerjaan, angkatan kerja di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 27,99 juta jiwa di tahun 2018 menjadi 30,48 juta di tahun 2022. Jika dipersentasekan, terjadi kenaikan sebesar 9 persen jumlah angkatan kerja selama 6 tahun dari tahun 2018-2023. Namun, Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan jumlah pengangguran sebesar 15 persen di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja terus bertambah, akan tetapi tidak diikuti dengan tersedianya lapangan tenaga kerja yang akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.



Gambar 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Pulau Sumatera (jiwa) Tahun 2018-2023

Dari gambar 1.1, jumlah angkatan kerja di Pulau Sumatera dari tahun 2018 sampai 2023 selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja disetiap tahunnya maka seharusnya diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang baik dengan menciptakan lapangan kerja yang seimbang dengan angkatan kerja. Tetapi, pada kenyataannya, penyerapan tenaga kerja pada sektor pengolahan di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi, dimana penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 2% dari tahun sebelumnya dan provinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera adalah provinsi Lampung sebesar 14%, provinsi Jambi sebesar 7%, provinsi Bengkulu 2,4%, provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,2%, provinsi Sumatera Utara sebesar 1% dan Riau sebesar 0,7%. Penurunan ini disebabkan oleh wabah *Covid-19* yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap dunia ketenagakerjaan baik dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri.

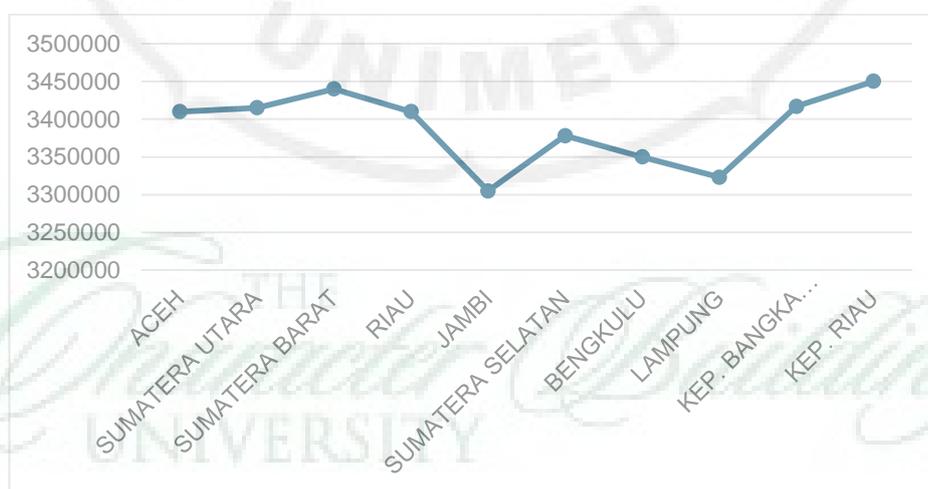
Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Upah Minimum provinsi. Kenaikan upah minimum pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera akan meningkatkan biaya perusahaan yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga per unit barang yang diproduksi. Kenaikan harga barang ini akan mengurangi permintaan atau konsumsi barang yang berakibat pada banyaknya barang yang tidak terjual, sehingga produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Penurunan jumlah produksi akan berdampak pada penurunan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan akan lebih memilih untuk mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja dan menggantikannya dengan teknologi padat modal, seperti mesin dan lainnya, untuk proses yang lebih efisien.

Mankiw dalam bukunya *Principles of Economics* (2006) menyebutkan bahwa kenaikan upah minimum dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, terutama di sektor padat karya, karena perusahaan lebih memilih menggunakan teknologi yang lebih efisien untuk menekan biaya. Kuncoro (2002) juga menegaskan bahwa kenaikan upah minimum sering kali berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja yang diserap karena perusahaan cenderung menggantikan tenaga kerja dengan modal.

Menurut teori Mankiw, upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum adalah tingkat upah yang makin tinggi

yang dikarenakan perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah. Sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya (Buchari, 2016).

Penerapan upah minimum oleh pemerintah daerah mempengaruhi permintaan pasar tenaga kerja. Dampaknya dari perubahan permintaan tenaga kerja dalam sektor tertentu akan berpengaruh ke sektor lainnya. Sektor industri pengolahan atau manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di suatu negara. Salah satu cara mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut adalah dengan mengembangkan sektor industri yang merupakan sektor pemimpin (*the leading sector*), tetapi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sektor industri pengolahan menjadi media untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar (Arifin, 2011)



Gambar 1.2 Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2023

Dari Gambar 1.2, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan UMP tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu sebesar Rp 3.450.000, dengan kenaikan sebesar 9,73% dari tahun sebelumnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

berada di urutan kedua dengan UMP sebesar Rp 3.417.000 dan kenaikan sebesar 4,66% dari tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ketiga dengan UMP sebesar Rp 3.440.000 dan kenaikan sebesar 3,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Utara berada di urutan keempat dengan UMP sebesar Rp 3.415.000 dan kenaikan sebesar 35,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Aceh berada di urutan kelima dengan UMP sebesar Rp 3.410.000 dan kenaikan sebesar 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan keenam dengan UMP sebesar Rp 3.378.000, mengalami kenaikan sebesar 7,43% dari tahun sebelumnya. Provinsi Bengkulu berada di urutan ketujuh dengan UMP sebesar Rp 3.350.000 dan kenaikan sebesar 38% dari tahun sebelumnya. Provinsi Lampung berada di urutan kedelapan dengan UMP sebesar Rp 3.323.000 dan kenaikan sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Provinsi Riau menempati urutan kesembilan dengan UMP sebesar Rp 3.305.000, mengalami kenaikan sebesar 16,04% dari tahun sebelumnya. Terakhir, Provinsi Jambi memiliki UMP terendah di Pulau Sumatera, yaitu sebesar Rp 3.305.000 dengan kenaikan sebesar 24,79% dibandingkan tahun sebelumnya.

Departemen bidang ketenagakerjaan melakukan penetapan dan penentuan secara terpusat besarnya jumlah upah yang harus diikuit oleh setiap provinsi di Indonesia. Penentuan tingkat upah yang sama dan berlaku dalam suatu daerah dibuat sesuai dengan hasil pertimbangan atas berbagai variabel lainnya baik yang berhubungan dengan tingkat kemampuan perusahaan dengan tingkat upah dalam

sub sektor lainnya. Penentuan juga didasari atas hasil peninjauan standar kebutuhan keluarga dan pekerja. Dengan demikian, pekerja akan terlindungi dari dampak pengupahan yang terlalu rendah atau dibawah rata-rata. Tingginya pendapatan akan mengurangi jam lembur kerja yang diakibatkan oleh adanya pendapatan yang tinggi (Aprilia, 2016).

Menurut Sumarsono (2003), penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja sehingga variabel ini dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Upah minimum dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini diakibatkan oleh upah yang tinggi dapat mengurangi jumlah tenaga kerja. Jika adanya peningkatan dari upah minimum yang sudah ditetapkan maka produsen akan meningkatkan biaya produksi kemudian menaikkan harga setiap unit barang yang sudah diproduksi.

Akibatnya, konsumen akan menahan diri untuk mendapatkan barang yang sudah diproduksi itu karena harganya yang tinggi, Dengan demikian, dalam kondisi ini produsen akan mengurangi jumlah produksi barangnya karena banyak dari barang produksi tersebut tidak terjual ke konsumen. Oleh karena itu, pengurangan jumlah tenaga kerja diakibatkan oleh terjadinya penurunan hasil produksi dan sebaliknya dengan turunnya upah akan meningkatkan permintaan terhadap jumlah tenaga kerja (Sumarsono, 2003)

Penyerapan tenaga kerja di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda di setiap wilayah. Todaro dan Smith (2015) menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah

salah satu elemen utama yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan.

IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Arsyad dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pembangunan* (2010) menjelaskan bahwa peningkatan IPM mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, sehingga lebih mudah terserap di pasar kerja. Hal ini sejalan dengan teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker dalam bukunya *Human Capital* (2007), yang menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah investasi penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dalam konteks pembangunan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja juga sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta pengembangan SDM. Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kualitas SDM di setiap daerah bervariasi. Wilayah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik cenderung lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja, karena produktivitasnya juga lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan kualitas SDM yang rendah menghadapi tantangan lebih besar dalam hal penyerapan tenaga kerja. Peningkatan kualitas SDM dapat diukur melalui angka IPM. Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat, semakin besar

potensi peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, tingginya IPM berpengaruh pada kemampuan tenaga kerja dalam mencari pekerjaan (Hafiz & H aryatiningsih, 2021). Grafik berikut akan menunjukkan data perkembangan IPM di Pulau Sumatera tahun 2023.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Aceh memulai dengan IPM sekitar 73, yang lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain. Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki nilai IPM yang sedikit lebih tinggi, mendekati angka 74, menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang relatif lebih baik. Riau sedikit lebih rendah dari Sumatera Barat, dengan IPM sekitar 73. Sementara itu, Jambi dan Sumatera Selatan memiliki IPM yang hampir sama dengan Riau, namun

sedikit lebih rendah, berada di sekitar angka 72–73. Bengkulu dan Lampung menunjukkan penurunan IPM lebih lanjut, dengan Bengkulu mendekati angka 71 dan Lampung sekitar 70, yang merupakan salah satu nilai terendah di grafik ini. Kepulauan Bangka Belitung mengalami sedikit peningkatan dari Lampung dengan IPM mendekati 72, sedangkan Kepulauan Riau memiliki IPM tertinggi di antara semua provinsi, mendekati angka 77. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa Kepulauan Riau memiliki tingkat pembangunan manusia tertinggi di Sumatera, sementara Bengkulu dan Lampung berada di posisi yang lebih rendah.

Menurut data dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di bawah 60 termasuk dalam kategori rendah. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa IPM di beberapa daerah tergolong tinggi. Daerah dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang lebih terampil dan berkualitas. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas lainnya berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang lebih signifikan di berbagai sektor ekonomi. Ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Teori modal manusia (human capital theory) yang dikemukakan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961) menegaskan bahwa peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini, pada gilirannya, berpotensi mengurangi tingkat pengangguran dan membuka peluang bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi.

Namun, teori Becker tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di Pulau Sumatera, di mana meskipun IPM mengalami peningkatan, tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Situasi ini dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan yang ada, yang tidak mampu meningkatkan kemampuan masyarakat secara efektif, serta masalah kesehatan yang menghambat peningkatan kualitas hidup. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang baik juga masih terbatas, sehingga peluang kerja dan pendapatan menjadi terhambat.

Contohnya, Lampung sebagai salah satu provinsi strategis di Sumatera masih mengalami keterlambatan dalam pengembangan dan investasi publik. Seharusnya, IPM provinsi ini tidak lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial dalam mendukung pembangunan kualitas SDM. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak yang setara, mengingat dalam praktiknya, masyarakat miskin sering kali kesulitan mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan (Becker, 1993).

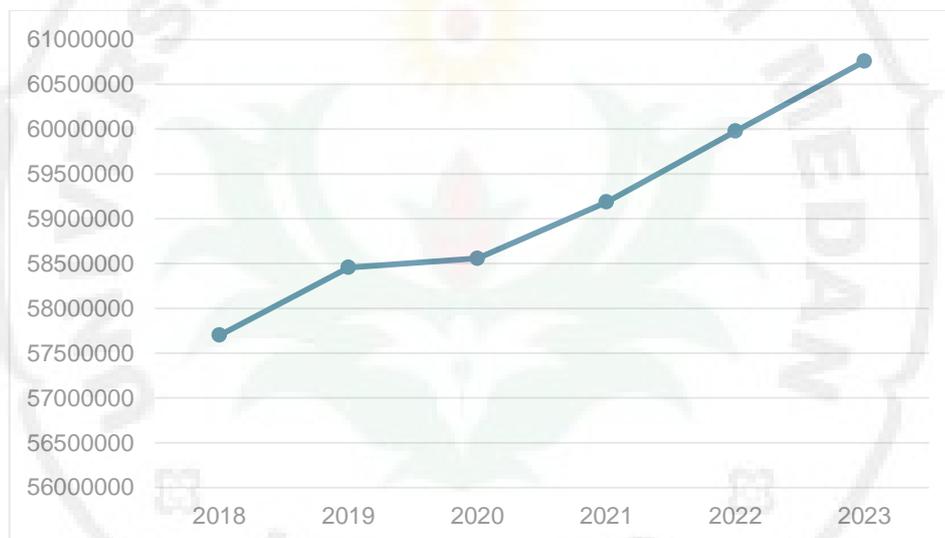
Penyerapan tenaga kerja itu sendiri sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Adanya pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang berubah dari waktu ke waktu akan menyebabkan adanya tuntutan kebutuhan tenaga kerja dan penambahan jumlah produksi. Penyerapan tenaga kerja dan jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011).

Menurut Sukirno dalam bukunya Ekonomi Pembangunan (2017), jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan ekonomi jika diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi. Arsyad (2010) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dapat meningkatkan skala ekonomi, yang pada akhirnya mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperluas pasar domestik.

Langkah terpadu dan ekstensif terhadap perluasan penyerapan tenaga kerja harus dilakukan dengan presisi yang tinggi hal ini dilakukan sebagai cara untuk menumbuhkan kondisi yang stabil antara tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dengan permintaan dari pasar tenaga kerja. Hubungan tingkatan yang tidak paralel antara pertumbuhan tenaga kerja dan kuota lapangan kerja akan berdampak pada terjadinya pengangguran. Dan pada taraf yang sama, dengan terjadinya peningkatan angka pengangguran yang tinggi, maka akan mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningginya beban masyarakat. Hal ini kemudian dianggap sebagai faktor pemicu konflik sosial dalam masyarakat yang pada akhirnya realisasi dan usaha dalam pembangunan sektor ekonomi dalam periode jangka panjang mengalami stagnansi (Depnakertrans, 2013).

Jumlah penduduk di Pulau Sumatera mengalami kenaikan tiap tahunnya. Unsur penyebab pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan keluar (Fachreza, 2015). Adanya kenaikan penduduk harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, agar tidak timbul

permasalahan ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Tetapi, jumlah penduduk ini bisa menjadi keunggulan modal pembangunan ekonomi sebab jumlahnya yang besar memberikan nilai tambah produksi disetiap wilayah berdampak perluasan pasar domestik (Djupiansyah, 2017). Namun pada realitanya lapangan kerja belum mampu menampung penduduk yang semakin besar.



Gambar 1.4 Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera tahun 2018-2023

Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Pulau Sumatera dari tahun 2018 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Pulau Sumatera berjumlah sekitar 5.700.000 jiwa. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai sekitar 6.000.000 jiwa pada tahun 2023.

Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang konsisten di Pulau Sumatera selama periode tersebut. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 15.115.200 jiwa, provinsi Lampung diurutan kedua yaitu

sebesar 9.176.600 jiwa, diurutan ketiga ada provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 8.657.000 jiwa, diurutan keempat ada provinsi Riau yaitu sebesar 6.614.400 jiwa, diurutan kelima ada provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5.640.600 jiwa, diurutan keenam ada provinsi Aceh yaitu sebesar 5.407.900 jiwa, Diurutan ketujuh ada provinsi Jambi yaitu sebesar 3.631.100 jiwa, diurutan kedelapan ada provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 2.179.800 jiwa, Diurutan kesembilan ada provinsi Bengkulu yaitu sebesar 2.060.100 jiwa dan diposisi kesepuluh ada provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 1.494.600 jiwa. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga semakin bertambah sehingga semakin banyak yang membutuhkan lapangan kerja.

Ulfa (2021) meneliti pengaruh upah minimum provinsi (UMP), jumlah penduduk dan penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada periode 2010-2019.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, Meilinda Maya Widyastuti (2009) dengan studi Analisis Pengaruh Modal Kerja, Tingkat Upah, Tingkat Output dan Tunjangan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di kabupaten Pati menemukan bahwa variabel tingkat upah dan tunjangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel modal kerja berpengaruh positif dan signifikan, variabel tingkat output berpengaruh positif dan signifikan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan kasus serupa kedalam ranah pembahasan ilmiah dengan mengangkat tema penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Pulau Sumatera”.

1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, ditemukan masalah-masalah berikut :

1. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera Berfluktuasi, banyak provinsi yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang berbeda.
2. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pengolahan terendah di Pulau Sumatera ada di tahun 2020.
3. Angkatan kerja di Pulau Sumatera setiap tahun naik tetapi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja.
4. Upah minimum provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya
5. Indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera selalu mengalami kenaikan.
6. Jumlah penduduk di Pulau Sumatera terus mengalami kenaikan.

1.2 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah, (sugiyono, 2017) mengatakan bahwa karena keterbatasan tenaga, keuangan, waktu, dan untuk lebih

memperhatikan hasil penelitian, peneliti tidak meneliti seluruh objek atau situasi tertentu, tetapi menentukan focus. Oleh karena itu penulis membatasi masalah menjadi:

1. Objek penelitian adalah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera Utara 2018-2023.
2. Penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, yaitu bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2018-2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mengembangkan pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat jumlah penduduk terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat Upah Minimum Provinsi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat jumlah penduduk secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat Upah Minimum Provinsi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat jumlah penduduk secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di pulau Sumatera?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu pengaruh upah, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh semasa kuliah dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

b. Bagi Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera diharapkan bisa bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan-masukan bagi lembaga-lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja terutama di sektor industri pengolahan, agar bonus demografi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.